

**KEDUDUKAN HUKUM PERBUATAN PUNGUTAN LIAR (PUNGLI)
SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI
ANALISIS PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 SERTA
PASAL 12 HURUF (e) UU RI NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN UU RI NOMOR 20 TAHUN 2001**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum
(M.H) pada Program Studi Magister Hukum Program Magister Program Pascasarjana
Universitas Kristen Indonesia
Konsentrasi Hukum : Hukum Pidana

Oleh:

**PUJI KURNIAWAN
NIM : 2002190102**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA JAKARTA
TAHUN 2022**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Puji Kurniawan

NIM : 20022190102

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang ber judul “Kedudukan HukumPungutan Liar (Pungli) Sebagai Tindak Pidana Korupsi (Analisis Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Serta Pasal 12 Huruf (E) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001” adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku–buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 28 November 2022



(Puji Kurniawan)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

KEDUDUKAN HUKUM PUNGUTAN LIAR (PUNGLI) SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI (ANALIS PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 SERTA PASAL 12 HURUF (e) UNDANG –UNDANG RI NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 20 TAHUN 2001

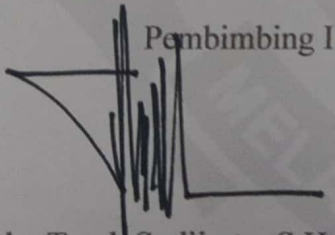
Oleh:

Nama : Puji Kurniawan.
NIM : 20022190102.
Program Studi : Hukum Program Magister.
Konsentrasi : Hukum Pidana.

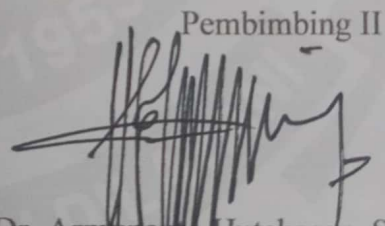
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam sidang tesis guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 28 November 2022

Menyetujui,

Pembimbing I


Dr. Drs. Tatok Sudjiarto, S.H., M.H., M.T.L.
NIDN/NIDK: 211036 / 8931720021

Pembimbing II


Dr. Armunanto Hutahaean, S.E., S.H., M.H.
NIDN/NIDK: 160677 / 8986240022

Ketua
Program Studi Hukum Program Magister



Dr. Wiwik Sri Widiarto, S.H., M.H.
NIDN/NIDK: 141104 / 0327096504

Direktur
Program Pascasarjana



Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., P.A.
NIDN/NIDK: 001473 / 0320116402



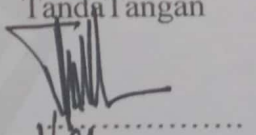
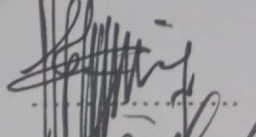
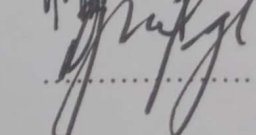
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada Tanggal 28 November 2022 telah diselenggarakan sidang tugas akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Puji Kurniawan.
NIM : 20022190102.
Program Studi : Hukum Program Magister.
Konsentrasi : Hukum Pidana.

Termasuk ujian tugas akhir yang berjudul **“KEDUDUKAN HUKUM PUNGUTAN LIAR (PUNGLI) SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI (ANALIS PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 SERTA PASAL 12 HURUF (e) UNDANG –UNDANG RI NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 20 TAHUN 2001”** oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. drs.Tatok Sudjiarto, S.H.,M.H.,M.T.L.	Sebagai Ketua	
2. Dr. Armunanto Hutahaeen, S.E.,S.H.,M.H.	Sebagai Anggota	
3. Dr. Djernih Sitanggang, Bc.IP., S.H.,M.H.	Sebagai Anggota	

Jakarta, 28 November 2022



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Puji Kurniawan

NIM : 20022190102

Fakultas : Program Pascasarjana

Program Studi : Magister Hukum

Jenis Tugas Akhir : Tesis

Judul : Kedudukan Hukum Pungutan Liar (Pungli) Sebagai Tindak Pidana Korupsi (Analisis Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Serta Pasal 12 Huruf (E) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 28 November 2022



Puji Kurniawan

NIM: 20022190102

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang tidak terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat, hidayah, inayah, kesehatan dan kemudahan maka tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad SAW Rasul akhir Zaman yang selalu membimbing umatnya menuju jalan yang di Ridhoi oleh Allah SWT.

Selanjutnya, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan tesis ini, baik berupa dorongan moril maupun materil. Karena penulis yakin tanpa bantuan dan dukungan tersebut, sulit rasanya bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini. Oleh karena itu penulis secara khusus ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.BA.. Selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, Mpd., PA Selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.
3. Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H. Selaku Kaprodi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Dr. drs. Tatok Sudjiarto, S.H., M.H., M.T.L Selaku Dosen Pembimbing Tesis ke – I yang sudah meluangkan waktu dan ilmunya untuk membimbing dan membantu untuk mengarahkan penulisan tesis ini sampai selesai.
5. Dr. Armunanto Hutahaeon, S.E.,S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing Tesis ke – II yang sudah meluangkan waktu dan ilmunya untuk membimbing dan membantu untuk mengarahkan penulisan tesis ini sampai selesai.
6. Kepada segenap para dosen Universitas Kristen Indonesia. khususnya para dosen program magister yang telah memberikan ilmu, bimbingan serta pengalamannya kepada peneliti sehingga peneliti bisa mendapatkan ilmu serta pengalaman yang begitu berharga selama ini.

7. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam penelitian ini, yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu.
8. Terima kasih juga kepada seluruh sahabat-sahabat tercinta, yang selama ini setia berjuang bersama, yang selalu bisa menjadi motivasi dan penyemangat bagi penulis, yang selalu menjadi teman berbagi dan bahkan teman berproses yang luar biasa.

Sebagai akhir kata semoga Allah *Subhânahu Wata'âlâ* memberikan balasan atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. Dan juga, semoga apa yang telah kalian berikan menjadi berkah dan amal kebajikan serta bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Jakarta, 28 November 2022

Puji Kurniawan
NIM: 20022190102

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	LEMBAR		i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS		ii	
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR		iii	
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR		iv	
LEMBAR PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR		v	
KATA PENGANTAR		vi	
DAFTAR ISI		viii	
ABSTRAK		x	
BAB I : PENDAHULUAN		1	
A. Latar Belakang Masalah		1	
B. Perumusan Masalah		10	
C. Maksud dan Tujuan		11	
D. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep		11	
1. Kerangka Teoritis		11	
a. Teori Kepastian Hukum		11	
b. Teori Fungsional		13	
c. Teori Kewenangan		14	
2. Kerangka Konsep		15	
a. Pungutan Liar		15	
b. Tindak Pidana Korupsi		16	
E. Metode Penelitian		17	
1. Tipe Penelitian		17	
2. Spesifikasi Penelitian		18	
3. Metode Pendekatan		18	
4. Teknik Pengumpul Data		18	
5. Metode analisis dan penyajian data		18	
F. Sistematika Penulisan		18	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		20	
A. Konsep Dasar Tindak Pidana		20	
a. Pengertian Tindak Pidana		20	
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana		22	
c. Pertanggung Jawaban Pidana		27	

B.	Konsep Dasar Tindak Pidana Pungutan Liar	28
a.	Pengertian Pungutan Liar	28
b.	Dampak Pungutan Liar	29
c.	Pungutan Liar Dalam Peraturan Perundang-Undangan	29
d.	Modus Operandi Pungutan Liar	29
e.	Unsur-Unsur Tindak Pidana Pungutan Liar	31
f.	Ruang Lingkup Tindak Pidana Pungutan Liar	33
C.	Konsep dasar Tindak Pidana Korupsi	34
a.	Pengertian Tindak Pidana Korupsi	34
b.	Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi (Penyalahgunaan Wewenang Oleh Aparatur Sipil Negara / ASN).....	35
D.	Kosep Dasar Tentang Penegakan Hukum	37
E.	Teori Dasar Penegakan Hukum Tindak Pidana Pungutan Liar Dan Tindak Pidana Korupsi.....	44
a.	Teori Tindak Pidana Korupsi.....	44
b.	Teori Control Sosial.....	47
c.	Teori Penegakan Hukum.....	50

BAB III : TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR DAN DASAR HUKUMNYA.....53

A.	Perkembangan Pungutan Liar Di Indonesia	53
B.	Petugas Yang Berwenang Dalam Pemberantasan Pungutan Liar	57
C.	Mekanisme Dan Rosedur Penyelesaian Tindak Pidana Pungutan Liar.....	59
D.	Prespektif Tindak Pidana Pungli dalam KUHP.....	60
E.	Pungutan Liar Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.....	64

BAB IV: REVORMULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR.....68

A.	Factor Penghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Pungutan Liar	68
B.	Analisis Yuridis Perbuatan Pungutan Liar (Pungli) Sebagai Tindak Pidana Korupsi (Analisis Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3 Undang-Undang. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.....	77
C.	Optimalisasi Penegakan Hukum Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pungutan Liar.....	89

BAB V: PENUTUP 104

A.	Kesimpulan.....	104
B.	Saran.....	105

DAFTAR PUSTAKA.....106

Abstrak

Dewasa ini perbuatan melawan hukum salah satunya tindakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan pungutan liar terhadap masyarakat masih menjadi musuh kita Bersama untuk di selesaikan dan di berantas. Perbuatan pungutan liar yang masuk dalam kategori suatu tindak pidana sejauh ini di atur dalam KUHP yaitu tindak pidana dalam jabatan atau tindak pidana yang terkait dalam jabatan. Ada 13 (tiga belas) pasal yang ditarik secara mutlak sebagai Tindak Pidana Korupsi (Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 KUHP) dan 6 (enam) pasal ditarik sebagai tindak pidana jika dilakukan dalam rangka penyelesaian perkara Korupsi (Pasal 220, 231, 421, 422, 429 dan 430 KUHP). Namun secara fakta perbuatan melawan hukum tersebut dewasa ini tidak saja hanya dilakukan oleh masyarakat biasa melainkan perbuatan tersebut sudah merembet ke lini Aparatur Sipil Negara, sehingga praktek-praktek pungutan liar tersebut masuk dalam ranah birokrasi yang pada umumnya terjadi pada proses pelayanan publik. Terbenturnya aturan hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan tersebut masih menjadi suatu kelemahan dalam memberantas tindak pidana pungutan liar di Indonesia KUHP yang di juntokan ke Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 masih dinilai belum maksimal dalam memberantas tindak pidana pungutan liar. Karena seharusnya pungutan liar yang dilakukan oleh aparatur negara menjadi tindak pidana korupsi bukan tindak pidana umum oleh sebab itu banyak putusan hakim yang berbeda. Dalam rangka menggali dan mereformulasi penegakan hukum tindak pidana pungutan liar dalam tulisan ini penulis menggali menggunakan rumusan masalah di antaranya: 1). Bagaimana penerapan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 terhadap perbuatan Pungutan Liar (Pungli) saat ini ? 2). Bagaimana peranan penegak hukum dalam pemberantasan pungli sesuai Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 ? tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana landasan hukum menjadi obyek utama yang dianalisis yang kemudian dibantu dan di perkuat dengan berbagai macam teori yang relevan dan dilengkapi dengan bahan yang bersumber dari buku, jurnal dan lain-lain.

KataKunci: Korupsi, Pungutan Liar.

Abstract

Today, acts against the law, one of which is the actions of irresponsible individuals in carrying out illegal levies against the public, are still our common enemy to be resolved and eradicated. Acts of extortion that are included in the category of a crime so far regulated in the Criminal Code are generally criminal acts in office or criminal acts that are related to office. There are 13 (thirteen) articles that are absolutely withdrawn as Corruption Crimes (Articles 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 and 435 of the Criminal Code) and 6 (six) articles withdrawn as a crime if it is committed in the context of settling corruption cases (Articles 220, 231, 421, 422, 429 and 430 of the Criminal Code). However, in fact, today's unlawful acts are not only carried out by ordinary people, but these actions have spread to the ranks of the State Civil Apparatus, so that these illegal levies are included in the realm of the bureaucracy, which generally occurs in the process of public services. The clash of legal rules that can be used to resolve this is still a weakness in eradicating criminal acts of extortion in Indonesia's Criminal Code which is juxtaposed to Republic of Indonesia Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes as amended and added to the Republic of Indonesia Law. Number 20 of 2001 is still considered not optimal in eradicating non-criminal levy. Because illegal levies carried out by state apparatus should have been a criminal act of corruption, not a general crime, that's why many judges' decisions were different. In order to explore and reform law enforcement of criminal acts of extortion in this paper, the author explores using a formula of problems including: 1). How is the application of Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes as amended and added to Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 against the current act of extortion? 2). What is the role of law enforcers in eradicating extortion in accordance with RI Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes as amended and added to RI Law Number 20 of 2001? This paper uses an normative juridical research method in which the legal basis is the main object which is analyzed which is then assisted and strengthened by various relevant theories and supplemented by material sourced from books, journals and others.

Keywords: Corruption, Illegal Collection.